

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni Bandung, Bandung.
- Bahsan, M., 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti. Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, PT. Gramedia, Jakarta.
- Harsono, Boedi & Sudaryanto Wirjodarsono, 1996, *Konsepsi Pemikiran Tentang Undang – undang Hak Tanggungan*, Makalah Seminar Nasional “Kesiapan dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang – undang Hak Tanggungan”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- HS, H Salim, 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ismaya, Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnamasari, Irma Devita, 2002, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa PT Mizan Pusaka, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2002, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet. Pertama,  
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Cira Aditya Bakti,  
Bandung.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban  
Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan : Asas – Asas, Ketentuan –  
Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*,  
alumni, Bandung.

Suci, Ivida Dewi Amrih, Herowati Poesoko, 2009, *Hak Kreditur Separatis  
dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit* ,  
LaksBangPRESSindo, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Cet. pertama, Sinar  
Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Cet. keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1982 , *Aneka Perjanjian* , Alumni, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 Tahun  
1960

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah  
Berserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran  
Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1996 dan Tambahan  
Lembaran Negara No. 3632

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara  
Republik Indonesia No.182 Tahun 1998.

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur  
Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia No.6 Tahun  
2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan  
PPAT Lembaran Negara Republik Indonesia No. 52 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang  
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang  
Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  
Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia No.128 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan  
Jabatan PPAT. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 120 Tahun  
2016

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018  
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang  
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.  
Lembaran Negara Republik Indonesia No.349 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Dan Kantor Pertanahan. Lembaran Negara Republik  
Indonesia No.986 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang  
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan  
Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara  
Republik Indonesia No.231 Tahun 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/Pbi/2017 Tentang Pinjaman  
Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional. Lembaran  
Negara Republik Indonesia No.82 Tahun 2017.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang  
Perubahan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah.

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 Tentang Pelayanan  
Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Surat Edaran Nomor HR.02/687-400/X/2020, kantor pertanahan di Kota  
Pontianak

Kode Etik PPAT

### **C. Jurnal dan Tesis**

- A,Purna Noor, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”*Jurnal Lex Renaissance*, volume 3 Nomor 1, Januari, 2018,
- Gunarta, I Made Dwi, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji ,2020, Persepsi Kreditur Dan Ppat Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik,*Jurnal*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
- Imanda, Nadia, 2020, “Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan, Notaire*, Vol. 3.
- Karsono,Yulianus, 2014, *Kepastian Hukum Parate Executie Terhadap Obyek Hak Tanggungan dalam Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2012, *Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah pada kantor pertanahan kota Banjarbaru (Studi tentang Surat Kuasa memberikan Hak Tanggungan dan Jangka Waktu Pencatatan Pendaftaran Hak Tanggungan*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nufus, Nur Hayatun,2010, ”*Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat ( Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Bekasi Kota)*”, tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nurwulan, Nurwulan, 2021, *Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditur dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*,*Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Yogyakarta
- Peranginangin, Effendi, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta,
- Resmawan, I Putu Arwan Puspa, 2018, *Implikasi Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Komputerisasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Yogyakarta.
- Suwandi, Dimas Nur Arif Putra, 2018, “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*” *Jurnal*, Universitas Airlangga, Surabaya.

### **D. Internet**

<http://repository.unpas.ac.id/11732/4/10.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 agustus 2020, pukul 20.25 wib.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kredit/> diakses pada tanggal 7 September 2020, pukul 18.51 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia/#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20ini%2C%20perjanjian%20kredit,waktu%20tertentu%20dengan%20pemberian%20bunga.> Diakses pada tanggal 8 September 2020 Pukul 22.10 WIB

Sukmadinata, "Metodologi-penelitian-hukum-2/", <https://idtesis.com/> (diakses pada tanggal 15 September 2020 pada pukul 18:00)

<https://notarisruthlinapasaribu.id/2020/05/30/sejarah-tugas-wewenang-dan-bagaimana-menjadi-notaris-dan-ppat/> diakses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 18.26 WIB